

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Indonesia

Muhammad Fauzie¹, Novya Zulva Riani²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: mhdfauzi007@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

17 Februari 2025

Disetujui:

5 Maret 2025

Terbit daring:

16 Maret 2025

DOI: -

Sitasi:

Fauzie, M. & Riani, N. Z. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Indonesia.

Abstract:

Corruption remains a major challenge in Indonesia, impacting various sectors of society and affecting the economy. This study aims to examine the factors that influence corruption by analyzing the influence between democracy, the Human Development Index (HDI), and governance on perceptions of corruption in Indonesia from 2009 to 2023. This study uses a descriptive-inductive approach using time series data. Secondary data from institutions such as the Central Bureau of Statistics, Transparency International, and the World Bank. Multiple linear regression analysis was used to investigate the relationship between independent variables with Corruption Perception Index (CPI) as the dependent variable. The results show that democracy has a positive but insignificant impact on perceptions of corruption, the Human Development Index (HDI) shows a negative but insignificant relationship with corruption. Meanwhile, governance shows a positive and statistically significant effect on perceptions of corruption. The study found that 59.16% of the variation in corruption can be explained by the independent variables, while the remaining 40.84% is due to other factors not included in the study. The findings suggest that although the democratic process and human development are not directly correlated with the reduction of corruption, effective governance plays an important role in reducing the practice of corruption.

Keywords: Corruption, Indonesia, Democracy, Human Development Index (HDI), Government Governance

Abstrak:

Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, yang berdampak pada berbagai sektor masyarakat dan berpengaruh terhadap ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi korupsi dengan menganalisis pengaruh antara demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tata kelola pemerintahan terhadap persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-induktif dengan menggunakan data time series. Data sekunder dari lembaga-lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Transparency International, dan Bank Dunia. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel bebas dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap persepsi korupsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan korupsi. Sedangkan, tata kelola pemerintahan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap persepsi korupsi. Studi ini menemukan bahwa 59,16% variasi korupsi dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya 40,84% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun proses demokrasi dan pembangunan manusia tidak berkorelasi secara langsung dengan pengurangan korupsi, tata kelola pemerintahan yang efektif memainkan peran penting dalam mengurangi praktik korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Indonesia, Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tata Kelola Pemerintah

Kode Klasifikasi JEL: C23, R11, L83, Z30

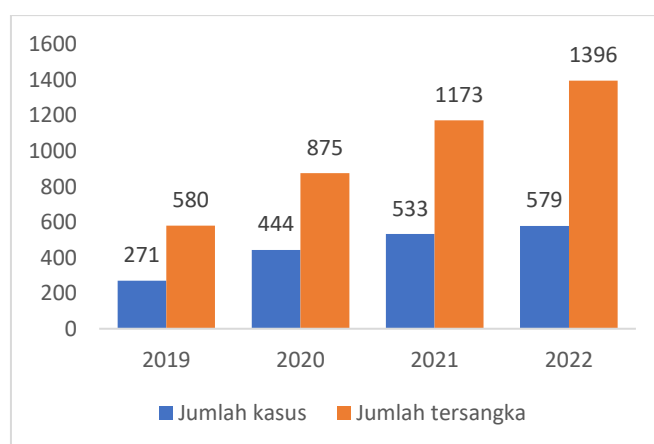
PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Korupsi bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi berbagai negara di dunia. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju sekalipun (Hariyani, Dominicus, and Asmara 2016). Korupsi juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, karena korupsi dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi

(Mauro 1995). Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi (Farooq et al. 2013). Korupsi juga menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme 1998).

Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 adalah 40 dan tahun 2020 sebesar 37. Asumsinya, semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angka ipk suatu negara, maka menunjukkan semakin terjerambab-nya suatu negara dalam kubangan korupsi (Transparency International 2020). Menurunnya skor IPK Indonesia dapat dimaknai pada tiga hal yaitu: ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi, kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi, menurunnya performa KPK dalam pemberantasan korupsi (Indonesia Corruption Watch 2021).

Tabel 1 Korupsi di Indonesia tahun 2019-2023



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2022

Kasus korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2019 hingga 2022, yang mencerminkan maraknya kejahatan korupsi. Hal ini menuntut upaya luar biasa dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan memberantasnya. Demokrasi berperan penting dalam pengawasan terhadap pemerintahan. Salah satu penyebab utama korupsi adalah pemerintahan yang otoriter, yang menyalahgunakan kekuasaan tanpa pengawasan. Demokrasi menuntut transparansi dan partisipasi, serta memberikan kontrol rakyat terhadap pemerintah, yang dapat mencegah korupsi melalui pengawasan dan kedaulatan rakyat (Djayadi 2013).

Selain itu, peningkatan pembangunan manusia dan partisipasi aktif masyarakat pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemberantasan korupsi negara tersebut, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akan lebih dapat meningkatkan proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum oleh masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat meningkatkan sikap kritis terhadap perilaku menyimpang aparat pemerintah. Tingkat kesejahteraan masyarakat umum yang tinggi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya jelas akan mengurangi dorongan untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti halnya korupsi.

Sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi ditandai dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang menjamin adanya supremasi hukum dan hukum dapat ditegakkan secara konsisten. Supremasi hukum berkontribusi pada penguatan institusi yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum, ketika institusi-

institusi ini berfungsi dengan baik, mereka dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk tindakan korupsi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pengaruh demokrasi, IPM, dan tata kelola pemerintahan terhadap korupsi di Indonesia dan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini mengkaji hubungan antara demokrasi, indeks pembangunan manusia, dan tata kelola pemerintahan terhadap korupsi. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa demokrasi memiliki hubungan terhadap korupsi. Studi oleh (Hariyani et al. 2016) menemukan bahwa demokrasi sebagai faktor politik berpengaruh negatif terhadap korupsi di kawasan asia-pasifik, ketika demokrasi di suatu negara meningkat maka korupsi yang terjadi semakin berrkurang. Sedangkan studi yang dilakukan oleh (TÜREDİ and Altiner 2016) menemukan bahwa peningkatan demokrasi dapat meningkatkan peningkatan pengendalian terhadap korupsi di negara berkembang. Studi oleh (Kotera, Okada, and Samreth 2012) juga menemukan bahwa demokrasi dapat meningkatkan pengendalian terhadap korupsi, lebih lanjut peningkatan ukuran pemerintah dapat menyebabkan penurunan korupsi jika tingkat demokrasi cukup tinggi.

Pembangunan manusia memainkan peran penting terhadap korupsi yang terjadi. Studi yang dilakukan oleh (Rajasa 2014) menemukan bahwa adanya hubungan positif yang kuat antara indeks pembangunan manusia dengan persepsi korupsi di negara APEC, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi. Sedangkan studi yang dilakukan oleh (Becherair and Tahtane 2017) menemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara pembangunan manusia dengan korupsi, dimana pembangunan manusia tidak menyebabkan korupsi, sebaliknya korupsi menyebabkan pembangunan manusia.

Tata kelola pemerintahan yang memastikan pelaku korupsi dapat ditangkap dan diadili dengan efektif. Studi yang dilakukan oleh (Hariyani et al. 2016) menemukan bahwa tata kelola pemerintahan dengan politik yang stabil dapat menurunkan korupsi di kawasan asia-pasifik, stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat untuk mengendalikan korupsi. (TÜREDİ and Altiner 2016) juga menemukan bahwa tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan pengendalian korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wartiningsih 2021) menemukan bahwa semakin buruk tata kelola pemerintahan maka korupsi yang terjadi alah semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif induktif dengan tujuan untuk menggambarkan variabel yang diteliti melalui data angka. Penelitian dilakukan di Indonesia menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Transparency International (TI), World Bank, dan sumber lainnya. Data sekunder ini dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data time series yang mencakup periode 2009-2023, dengan fokus pada demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tata kelola pemerintahan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi, yaitu melalui tulisan, buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Variabel-variabel dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator penting. Demokrasi (X1) diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam skala 0-100,

dimana 0 merupakan terendah dan 100 tingkat tertinggi. Indeks Pembangunan Manusia (X₂) didefinisikan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan dan hidup layak, dalam skala 0-100, dimana 0 merupakan pembangunan manusia rendah dan 100 merupakan pembangunan manusia sangat tinggi. Tata kelola pemerintahan (X₃) diukur dengan stabilitas politik, dimana tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan politik yang stabil, data yang digunakan yaitu political stability dalam skala -2.5 sampai 2.5, dimana -2,5 merupakan tata kelola sangat buruk dan 2,5 sangat tinggi/baik. Korupsi (Y) didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan public untuk memperoleh keuntungan pribadi, data korupsi yang digunakan adalah data indeks persepsi korupsi dalam skala 0-100, dimana semakin tinggi angkanya maka semakin bersih dari korupsi.

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan dua teknik analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis induktif. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai karakteristik data yang ada. Selanjutnya, analisis induktif untuk melihat adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sebelum melakukan analisis dalam penelitian diperlukan uji stasioner untuk melihat kestasioneran data runtut waktu melalui uji *Augmented Dicky-Fuller*. Untuk menganalisis hubungan antar variabel digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda (*Ordinary Least Square*) diterapkan dengan data yang berasal dari periode 2009-2023. Model regresi berganda ini digunakan untuk menguji adanya hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Dengan menggunakan regresi ini, dapat diketahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \quad (1)$$

Dimana Y adalah Korupsi, X₁ adalah Demokras, X₂ adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), X₃ adalah Tata Kelola Pemerintahan, β_0 adalah Intercept, $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ adalah Koefisien Regresi.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data regresi bebas dari masalah yang dapat mempengaruhi validitas hasil analisis. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Pertama, uji normalitas bertujuan untuk memastikan data terdistribusi normal menggunakan uji Jarque-Bera. Kedua, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara residual dengan periode sebelumnya, dan uji Durbin-Watson diterapkan untuk mendeteksi autokorelasi dalam model regresi. Ketiga, uji multikolonieritas mengukur korelasi antara variabel. Keempat, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji variasi residual yang tidak sama antar pengamatan.

Selain uji asumsi klasik, dilakukan juga uji hipotesis untuk mengukur signifikansi hubungan antar variabel. Uji t (parsial) digunakan untuk mengukur signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir, koefisien determinasi

(R²) mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis dalam penelitian, perlu dilakukan uji terhadap kestasioneran data. Dalam penelitian ini digunakan uji akar unit (*unit root test*) Augmented Dicky-Fuller (ADF), adapun hasil pengujianya sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Stasioner

Variabel	Probabilitas		
	Level	1 st Difference	2 nd Difference
Korupsi (Y)	0.3434	0.0017	0.0000
Demokrasi (X1)	0.8157	0.0272	0.0050
IPM (X2)	0.8554	0.0006	0.0006
Tata kelola pemerintahan (X3)	0.3128	0.0016	0.0241

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9,2025

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa variabel independen dan variabel dependen stasioner dalam tingkat yang sama, yaitu pada tingkat *first difference*. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas tiap variabel lebih kecil dari alpha 5%, dimana korupsi (Y) 0.0017, demokrasi (X1) 0.0272, IPM (X2) 0.0006, dan tata kelola pemerintahan (X3) 0.0016.

Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tata kelola pemerintahan terhadap korupsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2009-2023. Untuk menganalisis data digunakan model regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independent yaitu demokrasi, indeks pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan terhadap korupsi. Dengan menggunakan regresi linier berganda, penelitian ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap persepsi korupsi di Indonesia.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 02/17/25 Time: 21:50
Sample: 2009 2023
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.31605	29.44300	1.301363	0.2197
X1	0.305891	0.260372	1.174824	0.2649
X2	-0.252455	0.586907	-0.430145	0.6754
X3	14.26528	6.309817	2.260807	0.0450
R-squared	0.591615	Mean dependent var		34.33333
Adjusted R-squared	0.480238	S.D. dependent var		3.716117
S.E. of regression	2.679117	Akaike info criterion		5.032030
Sum squared resid	78.95436	Schwarz criterion		5.220844
Log likelihood	-33.74023	Hannan-Quinn criter.		5.030019
F-statistic	5.311797	Durbin-Watson stat		0.905356
Prob(F-statistic)	0.016559			

Sumber: Data di olah Eviews 9, 2025

Gambar 1 Hasil Analisis Linier Berganda

Hasil analisis linier berganda menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari demokrasi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), dan tata kelola pemerintahan (X3) menunjukkan bahwa hanya variabel tata kelola pemerintahan (X3) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat korupsi (Y). Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 38.31605 + 0.305891 * X1 - 0.252455 * X2 + 14.26528 * X3$$

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa demokrasi (X1) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap korupsi dengan nilai koefisien 0.305891. Hal ini berarti apabila demokrasi meningkat sebanyak satu persen, maka persepsi korupsi akan meningkat sebesar 0.305891. Sebaliknya, apabila demokrasi menurun sebanyak satu persen maka persepsi korupsi akan menurun sebesar 0.305891. Hal ini juga dapat dimaknai ketika demokrasi meningkat maka korupsi yang terjadi menurun atau berkurang dan sebaliknya.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi dengan koefisien regresi -0.252455. Hal ini berarti apabila IPM meningkat sebanyak satu persen, maka persepsi korupsi akan menurun sebesar -0.252455. Sebaliknya, apabila IPM menurun sebanyak satu persen, maka persepsi korupsi akan meningkat sebesar -0.252455. Hal ini juga dapat dimaknai ketika IPM meningkat maka korupsi yang terjadi menurun dan sebaliknya.

Tata kelola pemerintahan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi korupsi dengan koefisien regresi 14.26528. Hal ini berarti apabila tata kelola pemerintahan meningkat sebanyak satu persen, maka persepsi korupsi akan meningkat sebesar 14.26528. Sebaliknya apabila tata kelola pemerintahan menurun sebanyak satu persen, maka persepsi korupsi akan menurun sebesar 14.26528. Hal ini juga dapat dimaknai apabila tata kelola pemerintahan meningkat maka korupsi yang terjadi menurun dan begitu juga sebaliknya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan Eviews 9, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah kasus korupsi di Indonesia, yaitu demokrasi, IPM, dan tata kelola pemerintahan. Pembahasan ini akan menginterpretasikan hasil penelitian dan tujuan penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari penelitian tersebut:

Pengaruh Demokrasi Terhadap Korupsi di Indonesia

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa demokrasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia. Meskipun demokrasi meningkat, pengaruhnya terhadap penurunan korupsi tidak terlihat secara statistik. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan demokrasi tidak berdampak signifikan terhadap korupsi di Indonesia.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, dan keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun demokrasi memberikan kebebasan yang luas bagi masyarakat, kebebasan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran atau budaya antikorupsi yang kuat. Budaya antikorupsi di Indonesia menurut (BPS, 2024) masih terdapat sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa melakukan tindak korupsi merupakan suatu hal yang biasa/wajar. Survey yang dilakukan (BPS, 2024) tentang politik uang pada pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa 76.26 persen masyarakat yang pernah ditawarkan uang untuk memilih kandidat tertentu menerima tawaran tersebut. Hal ini berarti, meskipun demokrasi memberikan kebebasan dan transparansi yang

lebih besar, tanpa budaya antikorupsi dan partisipasi aktif masyarakat korupsi tetap bisa terjadi. Jadi, ada atau tidak adanya demokrasi tidak berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam melakukan korupsi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (TÜREDİ and Altiner 2016), yang menemukan bahwa demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi di negara berkembang, serta dengan penelitian (Prasetyo and Marselina 2022) yang menemukan bahwa demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian korupsi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hariyani et al. 2016) yang menemukan bahwa demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di kawasan Asia-Pasifik.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Korupsi di Indonesia

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia. Hal ini berarti meskipun IPM meningkat, tidak ada hubungan langsung yang signifikan dengan peningkatan atau penurunan tingkat korupsi. Peningkatan IPM tidak diikuti dengan perubahan signifikan dalam korupsi di Indonesia.

Peningkatan IPM sering disertai dengan peningkatan pendidikan masyarakat, yang membuka akses lebih luas ke jabatan publik. Pendidikan yang lebih tinggi memberi peluang kerja dan akses ke posisi pemerintahan, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi. Akses lebih baik ke sumber daya publik dapat menyebabkan individu merasa berhak memanfaatkan posisi mereka, terutama karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai posisi tersebut (Rose-Ackerman, 1999). (BPS 2021).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rajasa 2014) yang menemukan pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi korupsi, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia maka semakin rendah pula tingkat korupsi di negara APEC. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Becherair & Tahtane, 2017) yang menemukan bahwa pembangunan manusia tidak menyebabkan korupsi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gurrib 2015) yang menyatakan bahwa perubahan pada IPM tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan korupsi.

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Korupsi

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan tingkat korupsi, karena persepsi korupsi yang tinggi mencerminkan pemerintahan yang semakin bersih dari praktik korupsi. Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang optimal, dengan penegakan hukum yang efisien, dapat mengurangi praktik korupsi. Tata kelola pemerintahan dengan politik yang stabil dapat memperkuat institusi dan mekanisme pengawasan, serta memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hariyani et al. 2016) yang menemukan bahwa tata kelola pemerintahan dengan stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap korupsi, di mana stabilitas politik menjadi prasyarat utama untuk penegakan hukum dan pengendalian korupsi, sementara negara yang tidak stabil dapat mengalami penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayuningtyas and Setyaningrum 2018) yang menemukan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan korupsi. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (TÜREDİ and Altiner 2016) menemukan hubungan positif dan signifikan stabilitas politik terhadap pengendalian korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linier Berganda dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat, dapat disimpulkan Demokrasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari probabilitas (X_1) $0.2649 > \alpha = 0.05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa demokrasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia tidak dapat diterima. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari probabilitas (X_2) $0.6754 > \alpha = 0.05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia tidak dapat diterima. Tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari probabilitas (X_3) $0.0450 < \alpha = 0.05$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi di Indonesia diterima.

REFERENSI

- Becherair, Amrane, and Moura Tahtane. 2017. "KAUSALITAS ANTARA KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA MENA : ANALISIS DATA PANEL." 63–84.
- BPS. 2021. STATISTIK PENUNJANG PENDIDIKAN 2021. Vol. 44. Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2024. "Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024." 8.
- Djayadi, Hanan. 2013. Korupsi Dalam Demokrasi.
- Farooq, Abdul, Muhammad Shahbaz, Mohamed Aroui, and Frédéric Teulon. 2013. "Does Corruption Impede Economic Growth in Pakistan?" *Economic Modelling* 35:622–33. doi: 10.1016/j.econmod.2013.08.019.
- Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi, and Rosa Alonso-Terme. 1998. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Prepared.
- Gurrib, Ikhlās. 2015. "The Relationship between the Inequality-Adjusted Human Development Index and the Corruption Perceptions Index in Gulf Cooperation Council (GCC) Major Economies." *The Political Economy of Wasta: Use and Abuse of Social Capital Networking (January 2015)*:47–61. doi: 10.1007/978-3-319-22201-4.
- Hariyani, Happy Febrina, Savio Priyarsono Dominicus, and Alla Asmara. 2016. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region)." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2):32–44.
- Indonesia Corruption Watch. 2021. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Kotera, Go, Keisuke Okada, and Sovannroeun Samreth. 2012. "Government Size, Democracy, and Corruption : An Empirical Investigation." *Economic Modelling* 29(6):2340–48.

doi: 10.1016/j.econmod.2012.06.022.

Mauro, Paolo. 1995. "CORRUPTION AND GROWTH." *The Quarterly Journal of Economics* 110(3):681–712.

Prasetyo, Tri Joko, and Marselina Marselina. 2022. "ADAKAH PERBEDAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGENDALIAN KORUPSI ANTARA NEGARA MAJU, MENENGAH DAN MISKIN?" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11(3):191–97.

Rahayuningtyas, Dwi Prihatni Amrih, and Dyah Setyaningrum. 2018. "PENGARUH TATA KELOLA DAN E-GOVERNMENT TERHADAP KORUPSI." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 1(4):431–50. doi: 10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597.

Rajasa, Aiaz. 2014. "ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PERSEPSI KORUPSI PADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA APEC." 11(1):77–87.

Rose-Ackerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Vol. 19. United Kingdom: THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.

Transparency International. 2020. *Corruption Perceptions Index 2020*.

TÜREDİ, Salih, and Ali Altiner. 2016. "ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS AFFECTING CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES." *Faculty of Economics and Administrative Sciences* 7(1):23–38. doi: 10.2307/j.ctt1tm7gt4.8.

Wartiningih, Wartiningih. 2021. "APAKAH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR POLITIK MAMPU MENEKAN KECENDERUNGAN TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA?" *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 4(2):88–106. doi: 10.14710/jdep.4.2.88-106.